

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI BULAK BARU KEDUNG JEPARA

Muh Rafi Alfaris<sup>1</sup>

<sup>1</sup> IAIN Kudus, Indonesia  
email: rafialfaris@ms.iainkudus.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Copyright (c) 2020 Sadar Wisata: Jurnal Pawirisata



**Corresponding Author:** Muh Rafi Alfaris, IAIN Kudus, rafialfaris@ms.iainkudus.ac.id

Received Date: 13 Mei 2024

Revised Date: 26 November 2024

Accepted Date: 30 Nopember 2024

### Artikel Info

Kata kunci:  
Partisipasi Masyarakat, Pantai Bulak Baru, Pengembangan Pariwisata.

### Abstrak

Tingkat partisipasi masyarakat pribumi dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengembangan di sektor pariwisata. Pemerintah dibebankan untuk dapat mendorong masyarakat untuk turut ikut serta, namun faktanya hal tersebut menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif bagi kedua belah pihak. Tujuan riset ini yakni mendedah partisipasi masyarakat pribumi Desa Bulak Baru dalam pengembangan pariwisata Pantai Bulak Baru Kedung pra dikelola dan pasca dikelola oleh pemerintah. Metode kualitatif diaplikasikan peneliti untuk mengkaji tangga tingkat partisipasi masyarakat pribumi dalam proses pengembangan kepariwisataan Pantai Bulak Baru, di mana sekarang dipegang oleh pemerintah dengan menerapkan tangga partisipasi dari saudara Arnstein. Hasil riset yakni partisipasi masyarakat lokal kini Desa Bulak Baru di awal pengembangan pariwisata Pantai Bulak Baru menetap pada tangga tingkat derajat kuasa kemudian anjlok ke tangga tingkat partisipasi semu pasca Pantai Bulak Baru di pegang kendali oleh pemerintah. Karenanya, wewenang pemerintah hanya terpaku pada pengembangan fisik saja tanpa diikuti dengan langkah tepat untuk mendongkrak partisipasi masyarakat pribumi supaya sumber daya manusianya juga ikut berkelanjutan.

Keywords:  
Community Participation, Bulak Baru Beach, Tourism Development

### Abstract

*The level of participation of indigenous people is needed by stakeholders in the development of the tourism sector. The government is charged to be able to encourage the community to participate, but in fact it has a negative impact as well as a positive impact for both parties. The purpose of this research is to explore the participation of the indigenous community of Bulak Baru Village in the development of tourism at Bulak Baru Kedung Beach, pre-managed and post-managed by stakeholders. The qualitative method was applied by the researcher to examine the ladder of the level of participation of the indigenous community in the process of tourism development of Bulak Baru Beach, which is now held by stakeholders by applying Arnstein's ladder of participation. The result of the research is that the participation of the local community is now Bulak Baru Village at the beginning of the tourism development of Bulak Baru Beach settled on the ladder level (Degree of Citizen Power) then dropped to the ladder level (Tokenism) after Bulak Baru Beach was held by stakeholders. Therefore, the authority of stakeholders is only fixated on physical development without being followed by the right steps to boost the participation of indigenous people so that their human resources are also sustainable*

## PENDAHULUAN

Umumnya setiap ada pengembangan di sektor pariwisata pasti sudah mempunyai konsep yang sudah disusun secara sistematis,

didalamnya pula terdapat 2 indikator yakni keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dimana keduanya memiliki keterkaitan (Asrini

& Adnyani, 2023; Margaretha, 2024). Tidak sedikit dijumpai kasus bahwa tingkat keterlibatan masyarakat setempat mempengaruhi percepatan pengembangan pariwisata. Di sisi lain, harapan dari pengembangan pariwisata dapat mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Nurwanto, 2020; Lasso & Dahles, 2023; Maf'ula *et al.*, 2024). Sedangkan terkadang dalam proses pengembangan pariwisata mengalami banyak sekali ganjalan kalau tidak ada suara (*support*) dari pribumi setempat (Kulandima & Lasso, 2023; Park *et al.*, 2024). Banyak sekali model perencanaan untuk pengembangan pariwisata, salah satu diantaranya yakni model partisipatif, dimana melibatkan komunitas sebagai aktor berupa masyarakat setempat yang diberikan kesempatan untuk turut andil dalam merencanakan serta memiliki wewenang untuk mengatur pariwisata dengan harapan agar mendapatkan manfaat dari banyak pihak sehingga mendapatkan finansial yang lebih tinggi (Prasetyo *et al.*, 2024; Mularsari *et al.*, 2024). Tujuan dari konsep ini sendiri menawarkan jalur alternatif untuk strategi pengembangan melalui masyarakat lokal tepatnya masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lokasi pariwisata guna mendongkrak penghidupan masyarakat yang lebih sejahtera sehingga masyarakat lokal harus melibatkan dirinya dalam pengembangan pariwisata tersebut (Kulandima & Lasso, 2023; Hermawan & Suryono, 2023).

Dalam pengimplementasiannya di lapangan, pemberlakuan dari konsep pariwisata berbasis komunitas lokal tersandung berbagai hambatan. Terjadinya hambatan tersebut disebabkan oleh kondisi masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas yang beragam dari masyarakat setempat maupun masyarakat sekitar. Sedangkan tingkat suara dan dukungan mereka sangat berarti bagi pemerintah guna dapat melakukan pengembangan pariwisata (Saputra & Pitanatri, 2023; Chaniago *et al.*, 2024). Dapat kita amati di berbagai daerah, ada yang pengembangan pariwisatanya lambat

maupun sulit menerapkan konsep tadi secara menyeluruh, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan baik itu di sektor budaya, operasional, maupun struktural (Reindrawati, 2023). Keterbatasan tersebut beragam meliputi, faktor infrastruktur, faktor keuangan, ataupun tingkat pengetahuan dalam diri masyarakat tersebut (Elim & Mba, 2021; Loupary, 2022; Wahyuningtyas, 2023; Talitha, 2024). Dari keterbatasan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat membutuhkan pihak luar untuk dapat mensejahterakan mereka semua.

Pihak luar tersebut salah satunya yakni pemerintah, dengan adanya pihak pemerintah masyarakat akan dapat terbantu dengan cara kerjasama. Akan tetapi, jikalau pemerintah ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas lokal yang kini disebut masyarakat setempat dapat memunculkan dampak baginya. Salah satunya, masyarakat akan diberikan kemanfaatan berupa pendampingan ataupun *training* guna menciptakan peningkatan pengetahuan berupa evaluasi, monitoring, serta pengawasan dalam agenda pengembangan pariwisata (Kurniawan, 2023; Suryana *et al.*, 2024). Munculnya konflik dalam kalangan masyarakat dapat terjadi ketika pemerintah yang ikut andil dalam pengembangan pariwisata justru malah merampas tanah dan pendistribusian pemasukkan pendapatan serta hak pengelolaan lahan pariwisata (Kulandima & Lasso, 2023). Berdasarkan pemaparan tersebut, diperlukan langkah untuk menganalisis partisipasi kaum pribumi dalam pengembangan pada sektor pariwisata yang diurus oleh pemerintah, disini peneliti mengaplikasikan tangga partisipasi masyarakat yang terbagi hanya satu yakni tangga partisipasi (Arnstein, 1969; Sheppard-Hawkins, 2024).

### **Gambar 1. Partisipasi Masyarakat menurut Arnstein**

Citizen Control	Delegated of Citizen Power	8
Delegated Power		7
Partnership		6
Placation	Tokenism	5
Consultation		4
Information		3
Therapy	Non-Participation	2
Manipulation		1

Sumber: Arnstein, 1969.

Konsep Tangga Partisipasi Arnstein, menggambarkan berbagai tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks perencanaan dan pengembangan. Model ini terdiri dari 8 tingkat, dibagi menjadi tiga kategori utama: non-partisipasi, partisipasi simbolis, dan partisipasi nyata. Penjelasan dan contoh praktis sebagai berikut.

Ketika di cermati dengan teliti pada tabel diatas menampilkan konsep yang masyhur dengan sebutan “Tangga Partisipasi Arnstein”. Pada kolom non-partisipasi memuat 2 tingkat yakni manipulasi di tingkat pertama dan terapi di tingkat kedua. Di tingkat manipulasi tersirat makna dalam perencanaan pengembangan, pribumi tidak mempunyai andil untuk ikut turut serta. Pemerintah akan memilih orang yang dekat dengannya untuk menjadi satu perwakilan saja, dan terlebih dahulu didoktrin untuk mengikuti permintaannya. Sebagai contoh praktisnya yaitu Pemkab hanya memilih beberapa individu sebagai perwakilan (petinggi Bulak Baru) yang dekat dengan mereka untuk menjadi perwakilan, tanpa melibatkan masyarakat pribumi.

Selanjutnya di tingkat terapi tersirat makna walaupun terjadi komunikasi dengan pribumi tetapi sangat terbatas, karena pemerintah sudah menunjuk orang yang biasanya dekat dengannya, disini komunikasi akan berjalan hanya sejalur saja. Pemerintah hanya akan menginfokan kebijakannya tanpa memperhatikan aspirasi dari pribumi. Sebagai contoh praktisnya yaitu Pemkab menginformasikan kepada masyarakat pribumi

tentang kebijakan pariwisata yang akan diterapkan, tetapi tidak mempertimbangkan aspirasi dari mereka.

Berikutnya pada tangga tingkat ke 3 sampai ke 5 tergolong partisipasi semu. Di tingkat pemberian informasi tersirat makna walaupun sudah terjalin komunikasi serta penyampaian informasi kepada pribumi, tetapi hanya sejalur saja dan minim menampung feedback. Sebagai contoh praktisnya yaitu Pemkab mengeluarkan informasi guna mengadakan pertemuan untuk menjelaskan rencana dan manfaat dari proyek pariwisata, walaupun ada kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk terlibat dalam diskusi dan memberikan pendapat, namun aspirasi mereka sepenuhnya tidak akan dipenuhi.

Selanjutnya di tingkat konsultasi tersirat makna telah terjalin komunikasi dua jalur itu itu hanya sebagai formalitas belaka, serta tampungan aspirasi pribumi belum sepenuhnya diakomodasi. Pemerintah hanya mendengar lalu mengiyakan, namun tidak sampai di proses realisasi. Sebagai contoh praktisnya yaitu Pemkab mengadakan forum diskusi untuk mengumpulkan pendapat masyarakat pribumi tentang pengembangan wisata pantai Bulak Baru, tetapi setelah mendengarkan, mereka tetap memutuskan tanpa mengakomodasi sebagian besar aspirasi yang diberikan.

Kemudian di tingkat penentrangan tersirat makna dalam pengkomunikasian serta negosiasi antara pemerintah dengan pribumi sudah berjalan baik dan damai, akan tetapi kebijakan final tetap di tangan penguasa yakni pemerintah. Sebagai contoh praktisnya yaitu Pemkab telah mengadakan pertemuan untuk mendengarkan pendapat masyarakat pribumi dan kemudian menginformasikan bahwa mereka akan mempertimbangkan masukan tersebut, tetapi tetap final mengambil keputusan tanpa melibatkan mereka secara nyata.

Selanjutnya di urutan 3 teratas tergolong derajat kuasa tersirat makna pribumi memiliki

andil dalam pengambilan keputusan bersama. Kemudian di tingkat kemitraan tersirat makna pribumi dapat bernegosiasi dengan pemerintah serta mereka melayani dan berbincang-bincang seakan seperti teman kerjanya sendiri. Sebagai contoh praktisnya yaitu pemkab dan masyarakat pribumi membentuk tim kerja bersama untuk merencanakan pengembangan pariwisata, di mana kedua belah pihak memiliki suara yang setara dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Berikutnya di tingkat kuasa yang didelegasi tersirat makna pribumi memiliki kendali lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan dibandingkan dengan pemerintah, sedangkan pihak pemerintah hanya memaparkan kewenangannya saja kepada pribumi. Sebagai contoh praktisnya yaitu masyarakat pribumi diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur kegiatan berniaga di Pantai Bulak Baru, sementara pemkab hanya memberikan dukungan dan pengawasan agar tidak mengganggu ketertiban aktivitas para pengunjung.

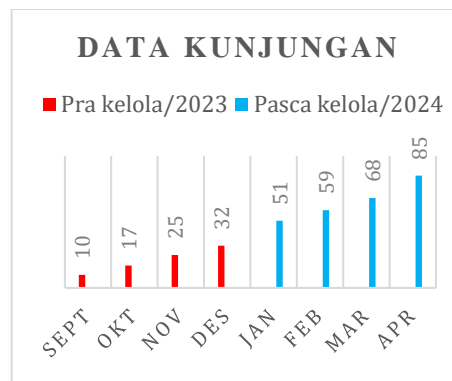
Terakhir di tingkat kendali masyarakat tersirat makna pribumi memiliki partisipasi secara menyeluruh dalam menentukan keputusan, bahkan sampai pada evaluasi kerja pemerintah. Ini merupakan bentuk partisipasi yang ideal di mana masyarakat mendominasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh praktisnya yaitu pemkab dan masyarakat desa Bulak Baru bekerja sama untuk mengembangkan pelatihan bagi pengelola kerajinan tangan dan produk unggulan terasi udang.

Riset tentang pariwisata berbasis komunitas seringkali berfokus pada peran serta masyarakat, manfaat pengembangan, atau masalah yang muncul setelah pariwisata dikembangkan (Asy'ari *et al.*, 2021; Nawangsari & Rahmatin, 2022; Putri & Suminar, 2023; Husin, 2024). Namun, belum banyak penelitian yang memperhatikan partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah pengembangan pariwisata dengan melibatkan

pihak-pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini, menggunakan konsep tangga Arnstein, kami bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat Desa Bulak Baru Jepara dalam pengembangan pariwisata Pantai Bulak Baru, baik sebelum maupun setelah pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah. Tangga Arnstein digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati dinamika dalam tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan indikator pada setiap tingkatnya.

Berdasarkan data yang didapati peneliti setelah pengamatan secara langsung dan berbincang-bincang dengan bapak Purwoko, data mengatakan sebagai berikut.

**Grafik 1: Data Jumlah Pengunjung**



**Sumber: Purwoko, 2024**

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sebelum adanya campur tangan berupa pengelolaan wisata Pantai Bulak Baru oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, data kunjungan ke Pantai Bulak Baru masih sedikit, hanya sekitar 10 hingga 32 pengunjung saja. Hal ini disebabkan oleh akses yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua dan minimnya pengembangan pantai. Namun, setelah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara, jumlah pengunjung Pantai Bulak Baru mulai melonjak. Hal tersebut tercermin pada data kunjungan mencapai 51 hingga lebih dari 85 orang sengaja datang untuk menikmati pemandangan Pantai Bulak Baru serta makanan tradisional.

Berdasarkan beberapa riset (Nofiyanti *et al.*, 2024; Sidiq *et al.*, 2023; Krisnasari, 2022) mengatakan bahwa wisata yang baru dirintis memang sulit untuk berkembang jika tidak mampu bersaing dengan wisata-wisata di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelibatan masyarakat pribumi (lokal) untuk

Riset peneliti ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat pribumi dalam proses pengembangan kepariwisataan, Desa Bulak Baru Kedung Jepara. Dasar pengkajian ini karena Pantai Bulak Baru memiliki daya tarik wisatawan yakni berupa makanan tradisionalnya serta peneliti ingin menganalisis dinamika Pantai Bulak Baru Kedung pra dikelola dan pasca dikelola oleh pemerintah menggunakan tangga partisipasi masyarakat Arnstein.

Pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Wawancara dengan Bapak Purwoko (Petinggi desa) dan Bapak Lukman (penjaja makanan) dilakukan selama 30-45 menit untuk masing-masing narasumber. Durasi ini cukup untuk menggali informasi mendalam mengenai wisata pantai Bulak Baru. Selain Bapak Purwoko dan Bapak Lukman, wawancara juga dilakukan dengan 5 responden lain yang terdiri dari masyarakat lokal, pelaku usaha, turis domestik, mahasiswa, dan pelajar. Total responden dalam penelitian ini mencapai 7 orang.

Adapun kriteria pemilihan informan berupa: 1) Memiliki pengetahuan dan

### **Potensi Pariwisata Desa Bulak Baru Kedung Jepara**

Desa Bulak Baru termasuk salah satu desa yang berada di Kabupaten Jepara yang memiliki potensi pariwisata berupa pantai (*Segoro*). Daerahnya dapat dijangkau menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi, jaraknya sekitar 11 km dari

dapat membantu, mengelola, dan mengembangkan wisata pantai. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, agar wisata tersebut dapat bersaing dengan wisata lain.

### **METODE PENELITIAN**

pengalaman terkait pariwisata; 2) Bersedia dimintai informasi lebih lanjut; 3) Mewakili berbagai perspektif, termasuk masyarakat lokal, pelaku usaha, pengunjung, dan kaum milenial. Observasi di Pantai Bulak Baru, dan dokumentasi dengan memotret sebagai wujud hasil riset.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 1) Pengumpulan data di lapangan; 2) Integrasi data yang terkumpul; 3) Penyajian data; dan 4) Penarikan kesimpulan (Arikunto, 2013; Huberman, 2014; Márquez *et al.*, 2024). Dengan menggunakan teknik analisis data interaktif ini, kesimpulan dapat dihasilkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan secara langsung di lapangan.

Adapun keterbatasan pada riset ini berupa selama periode observasi, terdapat beberapa hari dengan cuaca buruk, sehingga jumlah pengunjung di pantai berkurang. Selain itu, pada bulan Desember 2023 kondisi akses jalan menuju Pantai Bulak Baru hanya dapat dilalui dengan kendaraan roda dua dan jalan kaki. Hal ini dapat menyebabkan Pantai Bulak Baru tidak ramai seperti sekarang.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bundaran Ngabul Jepara jika menggunakan kendaraan pribadi, sedangkan jika menggunakan kendaraan umum dapat menghabiskan waktu sekitar 25 menit, karena terkadang jalanannya padat dan banyak warga beraktivitas di sepanjang jalan (Alfaris *et al.*, 2023). Secara letak (*geografis*), Pantai Bulak Baru berada di paling barat ujung Desa Bulak Baru, tepatnya berbatasan di sebelah timur

dengan Desa Bugel, selatan dengan Desa Panggung, barat dengan Laut Jawa, dan utara dengan Desa Tanggul Tlare. Pula menyimpan keunikan berupa disamping sebagai rekreasi keluarga, disini juga menyuguhkan berbagai ragam makanan tradisional dan tempatnya terpisah (khusus, diseberangnya, tidak dicampur dengan tempat hiburan).

### Gambar 2: Lokasi Pantai Bulak Baru



Sumber: Google Earth, 2024.

Menurut cerita tutur warga setempat, penamaan Bulak Baru berawal dari dua kata “Bulak” untuk akronim “*Bugel Pinggir Lak*” atau Bugel tepian dengan sungai menuju laut, sedangkan “Baru” merupakan penamaan untuk pemindahan lokasi desa, dimana mulanya berada di tepi pantai karena sering terkena abrasi kemudian dialokasikan ke daerah timurnya. Sehingga sekarang masyarakat desa maupun masyarakat sekitar menyebutnya Pantai Bulak Baru.

### Gambar 2: Salah satu kuliner di Pantai Bulak Baru



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024.

Jika kita melihat hasil potret 1 di atas, keunikan yang dimiliki Pantai Bulak Baru

yakni berupa kuliner jajanan tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri dan mencoba bernostalgia kulineran tradisional bagi wisatawan yang berkunjung. Telah terjadi peningkatan jumlah pengunjung di pantai ini, di tahun 2020 jumlah wisatawan bertotalan 50 orang, sedangkan di awal tahun 2024 ini mengalami peningkatan bertotalan 80 orang lebih (Purwoko, 2023). Potensi yang disimpan oleh Pantai Bulak Baru ini ternyata berhasil memancing masyarakat pribumi untuk sekedar bahu-membahu bersama elemen masyarakat untuk mengembangkan pantai sebagai area pariwisata sekaligus khusus untuk kalangan pecinta kuliner tradisional.

### Pengelolaan Pariwisata di Desa Bulak Baru Kedung Jepara

Pantai Bulak Baru menawarkan berbagai potensi wisatanya, dan mulai berhasil memancing masyarakat setempat untuk dikembangkan. Bermula di tahun 2013, muncul ide untuk mengembangkan potensi pantai yang digagas oleh Bapak Somad selaku seorang pemimpin lokal yang memiliki visi untuk memajukan desanya melalui sektor pariwisata, namun ternyata belum berhasil mengajak warga setempat untuk ikut membersihkan bibir-bibir pantai. Kemudian pada tahun 2014 dengan diangkatnya Bapak Purwoko sebagai petinggi di desa tersebut, ia berasal dari Semarang dan kemudian pindah ke Desa Bulak Baru karena tugas dinas dan akhirnya ber-KTP di Desa Bulak Baru. Beliau memimpin warga bulak baru dan meminta bantuan kepada Koramil Kedung 2 untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata di Desa Bulak Baru. Pada awal periodenya beliau berhasil menggandeng Koramil Kedung 2 dan pemuda desa bulak baru untuk melakukan pembersihan pantai karena masih dipenuhi dengan ranting rumput yang berlalu lalang. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Purwoko selaku petinggi desa bulak baru untuk melakukan pengembangan objek wisata Pantai Bulak Baru.

“...dulu, kondisi Pantai Bulak Baru terkena abrasi dan tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah setempat. Pemukiman di sekitar pantai terus terancam oleh abrasi, serta kepala desa dan pemerintah dulu tidak peduli terhadap masalah ini. Akibatnya, batas Pantai Bulak Baru berkurang dari tahun 1960 hingga 2010, ...Pak petinggi (saya) bersama Koramil Kedung 2 dan pemuda desa setempat untuk membuka lahan (babat alas) di daerah pesisir desa bulak baru untuk dijadikan sebuah pantai, dulunya ketika membersihkan daerah tersebut masih banyak sekali alang-alang dan semak-semak” (Purwoko, 2023).

Memang dulu awal periode pak purwoko, masyarakat belum begitu memahami keinginannya untuk memajukan Desa Bulak Baru di sektor kepariwisataan, maka antusiasme warga belum begitu banyak. Akan tetapi dengan seiring keaktifan pak purwoko untuk dekat di masyarakat serta sering berkunjung ke desa-desa sekitar desa Bulak Baru, akhirnya masyarakat memahami bahwa pak purwoko memiliki keinginan memajukan ekonomi desa lewat pengembangan wisata pantai, dan mulailah masyarakat mulai ikut aktif dan berdiskusi secara terbuka. Dan memiliki kesadaran bahwa Desa kita Bulak Baru walaupun desa kecil harus bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lewat wisata pantai.

### Gambar 3. Wujud gotong royong warga



Sumber: Purwoko, 2024.

Pertanda baik ditandai dengan ajakan pak purwoko kepada para pemuda desa serta berhasilnya ia dengan menggandeng Koramil Kedung 2, dengan langkah awal yakni gotong royong berupa membersihkan daerah bibir pantai yang masih dipenuhi ranting rerumputan yang berlalu lalang karena aksesnya masih sulit hanya berupa lahan lumpuran yang kurang produktif, kemudian mulailah sedikit demi sedikit akhirnya pantai Bulak kini sudah memiliki akses jalan. Tak sampai disitu saja setiap ada gelombang air laut naik bisanya akan membawa sampah-sampah dari lautan, jika melihat kondisi pantai yang begitu kotornya pak purwoko serta para warga setempat gotong royong untuk membersihkan pantainya (potret gambar 2). Dengan adanya partisipasi warga dapat memupuk rasa kebersamaan serta rasa saling memiliki pantai ini.

Kemudian akhirnya pada tahun 2015 dana proposal itu cair dan dibuat untuk membangun penahan gelombang, namun di tahun 2019 proyek sempat mandek karena pandemi covid melanda, dan barulah di tahun 2021 Pak Purwoko memulai merancang pengembangan Desa Bulak Baru di sektor perekonomian, dengan berkoordinasi dengan para warga setempat serta para pemuda desa yang tinggal di Desa Bulak Baru untuk mengembangkan lahan pantai melibatkan perencanaan penataan parkir, pengembangan taman, spot foto, tempat bermain anak-anak, dan fasilitas lainnya. Semua biaya pembelian bahan merupakan hasil dari mengajukan proposal ke pemerintahan provinsi. Dengan kucuran daya yang seadanya mulailah pengembangan pantai dimulai dengan mempekerjakan warga setempat yang ahli dalam bidang pertukangan dan pemberian gaji yang layak. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Purwoko selaku petinggi desa bulak baru.

“...awalnya bantuan saya ajukan lewat proposal ke provinsi, terus akhirnya 2015 tercapailah bantuan itu untuk penanggulangan abrasi, untuk tahap demi

tahap karena waktu program saya itu tahun 2019 saya itu ada rencana di bangun, tapi ada covid akhirnya tertunda, dan pelaksanaannya tahun 2021 mulai di bangun, sedikit demi sedikit sampai sekarang, berarti usianya wisata ini baru muda, sekitar 2 tahun. Itu nanti berkembang lagi mas, ada itu banyak gazebo-gazebo di pinggiran kan pemandangannya keliatan enak, nanti maju maju kan banyak sekali wahana, ...klo rencana pengembangan selanjutnya, iya itu membuat lahan parkir, taman, spot foto, tempat bermain anak-anak, disini tidak hanya menyuguhkan pemandangan saja tetapi juga untuk hal tersebut, saya juga mempunyai rencana untuk membuat menara eiffel” (Purwoko, 2023).

Tahun ke tahun pantai bulak baru menanjak banyak dikunjungi oleh para pelancong, baik masyarakat pribumi pula masyarakat luar. Di tahun 2023, pak purwoko memiliki inisiatif untuk menambah jumlah infrastruktur di pantai bulak baru yakni berupa pelebaran jalan, penataan lahan parkir serta menambah kios-kios yang menjaja makanan tradisional yang dapat disantap oleh pengunjung dengan biaya relatif murah mulai 6 ribuan.

"...kuliner disini disediakan ketika hari Jum'at, sabtu, dan ahad yang berjualan pun dari sampai sore hari selalu dipenuhi penjual kuliner maupun pembeli yang berkunjung, puncak ramainya keika hari ahad tiba. Sedangkan kalau hari selain yang disebutkan, itu tetap ada pengunjungnya tetapi tidak seramai ketika pas hari libur. Sekarang ini anak-anak muda kalau ingin berwisata kan pas hari libur seperti hari ahad" (Purwoko, 2023).

Melihat peluang di sektor pariwisata ternyata berhasil memancing Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara untuk turut serta dalam pengelolaan Pantai Bulak Baru Kedung. Mereka mulai mensurvei dan ikut andil dalam berbagai kegiatan gotong royong serta bersih-

bersih bibir pantai. Hal tersebut dikemukakan oleh bapak Luqman selaku penjaga dan penjaja makanan di Pantai Bulak Baru.

“...wisata Pantai Bulak Baru sudah ada sejak tahun 2014, tetapi mas dulu itu belum tertata seperti ini masih banyak semak-semak yang menjulang tinggi, kemudian wayah covid pantai ini sepi pengunjung. Kemudian setelah covid hilang barulah pantai ini mulai dikembangkan dan itu pemerintahnya mulai peduli” (Lukman, 2023).

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Bulak Baru Kedung Jepara berdasarkan Tangga Arnstein**

Kita mencermati tangga tingkat diatas, mengandung makna tersirat berupa di awal masa pengembangan pantai bulak baru, masyarakat pribumi memiliki andil dalam rencana pengembangan pantai bulak baru. Masyarakat pribumi mempersiapkan, mengarahkan, dan mempraktikkan pengembangan pantai bulak baru secara totalitas. Kebebasan yang dimiliki masyarakat pribumi tergolong dalam tangga tingkat derajat kuasa atau partisipasi masyarakat pribumi secara menyeluruh terhadap proses pengembangan pariwisata pantai bulak baru. Walaupun mereka hanya menyumbang kontribusi berupa omongan, tenaga, serta waktu, akan tetapi mereka sudah tergolong dalam bagian tangga tingkat derajat kuasa. Fenomena dalam proses awal pengembangan yang terjadi dalam masyarakat desa bulak baru, kasusnya serupa dengan temuan saudara Kulandima yakni pengembangan pariwisata pantai Oetune yang pengelolaannya dipegang mandiri oleh masyarakat pribumi (Kulandima, 2023). Lewat kelompok lokal yakni karang taruna, masyarakat pribumi dapat ikut serta dalam proses persiapan, menetapkan kesepakatan, serta pengalokasian bagian tugas kerja. Pada tangga tingkat ini masyarakat



pribumi dibebaskan untuk menyuarakan isi pemikirannya terkait dengan rencana dan kerjasama untuk mengembangkan pantai bulak baru untuk pariwisata serta kulineran.

Jenjang partisipasi masyarakat Desa Bulak Baru dalam pengembangan wisata pantai berawal dari pembersihan bibir pantai dari semak belukar serta mengguruki lahan tersebut dengan tanah karena dulunya tanah sudah tidak produktif (terkena abrasi). Sejak saat itulah mulai ada perhatian dari pemerintah dalam proses pengembangan wisata pantai bulak baru. Dalam jenjang tingkat ini masyarakat pribumi tergolong pada derajat kuasa atau bisa disebut pula partisipasi masyarakat secara menyeluruh terhadap proyek pengembangan Pantai Bulak Baru serta masuk dalam kategori kemitraan (Arnstein, 1969; Sheppard-Hawkins, 2024). Masyarakat pribumi setingkat dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah setara dengan masyarakat tersebut bagaikan rekam kerja tim dalam mensupport penuh pembukaan lahan pantai bulak baru. Keduanya juga menjalin kemitraan dalam mensukseskan dan pengimplementasian dari kebijakan bersama guna mendapatkan terbitan SK untuk pariwisata Pantai Bulak Baru.

Pada tahun 2024, pantai bulak baru sudah mulai digantikan pengelolaannya berpindah ke tangan Dinas Pariwisata, akan tetapi masyarakat pribumi tetap akan dilibatkan oleh pemerintah dalam proses pengembangan pantai bulak baru sebagai tempat pariwisata. Akan tetapi dijumpai hal yang berbeda yakni partisipasi masyarakat pribumi dalam pengelolaan berbanding terbalik dengan proses di awal pengembangan, pemerintah cenderung akan melibatkan dan membatasi orang yang memiliki keahlian dalam hal kepariwisataan ataupun orang yang selalu dekat dengan pemerintahan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada peran masyarakat pribumi yang menjaga pantai bulak baru, ikut serta pada proses pengembangan infrastruktur tempat wisata pantai, dan membuka warung-warung kecil. Namun, berbeda dengan awal perintisan

dimana partisipasi masyarakat pribumi termasuk dari keinginan masyarakat tersebut, di awal proses pengembangan yang dikendalikan oleh Dinas Pariwisata, faktor ekonomi menjadi pendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi secara menyeluruh.

Adanya partisipasi masyarakat pribumi dalam proses perencanaan dan memajukan pariwisata pantai itu disebabkan oleh adanya kucuran upah dari Dinas Pariwisata, tingkat partisipasi tersebut dapat merosot juga dapat disebabkan oleh pihak Dinas Pariwisata juga. Dapat dicermati pada masyarakat pribumi desa bulak baru memiliki ketergantungan tinggi pada pemerintah, dan tidak memiliki pemikiran yang berkelanjutan. Berbanding berbalik dengan temuan saudara Ahsani, dimana masyarakat pribumi tak sedikitpun bergantung pada pemerintah dalam proses pemberdayaan pariwisata, meliputi hal dana, fasilitas, maupun proses pengembangan (Ahsani *et al.*, 2018). Ketika pemerintah yakni dinas pariwisata maka masyarakat pribumi desa bulak baru akan menurutinya.

Hal yang telah dipaparkan peneliti mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat pribumi dalam proyek pengembangan pariwisata Pantai Bulak Baru tergolong tangga tingkat partisipasi semu. Maksudnya, partisipasi masyarakat dengan menyuarakan gagasannya sudah sampai pada pemerintah, tetapi masyarakat tidak terjamin suaranya dikabulkan oleh pemerintah, kemungkinan dikabulkannya pun sangat minim untuk dapat menciptakan perubahan dan perkembangan pada masyarakat Desa Bulak Baru. Terhitung sejak pemerintah mengambil kendali dari masyarakat, penataan dan pembatalan pengembangan pariwisata pantai cenderung hanya berjalan pada satu lajur saja. Masyarakat tersebut memang terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, akan tetapi hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan suara pendukung dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut jelas berbeda dengan pas waktu awal pengembangan, dimana

hampir semua ide gagasan untuk membangun kepariwisataan pantai bulak baru bersumber dari masyarakat tersebut.

Masyarakat desa bulak baru partisipasinya dalam bentuk musyawarah bersama guna membahas perencanaan proses pengembangan kepariwisataan pantai bulak baru, akan tetapi hasil akhir sudah ada ditangan pemerintah. Kendali yang ada di tangan masyarakat pribumi tersebut terbatas hanya sekedar memberikan sumbangsih berupa ide, masukan, serta saran yang dapat menjadi titik temu pada hasil keputusan bersama. Hal tersebut menandakan partisipasi masyarakat pribumi tergolong dalam tangga tingkat konsultasi, dapat dilihat masyarakat hanya diberikan momen untuk berbicara dan menyampaikan gagasannya akan tetapi pemenangnya sudah ditentukan yakni pemerintah. Hasil dari penyampaian ini sangat rendah karena masyarakat tidak mendapatkan jaminan yang sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan dengan kata lain tidak di hiraukan pemerintah dinas pariwisata.

### **Dampak Pengembangan Wisata Pantai Bulak Baru Kedung Jepara**

Adapun dampak yang timbul saat Pantai Bulak Baru dikelola dan dikembangkan, dapat memberikan dampak signifikan pada beberapa aspek, di antaranya:

#### **1. Dampak Sosial-Budaya**

- a. Perubahan pola kerja, sebelum pengembangan dan pengelolaan Pantai Bulak Baru yang lebih tertata, banyak warga yang bergantung pada pertanian padi dan nelayan penangkap ikan laut. Dengan adanya wisata, warga mulai beralih ke sektor pariwisata, membuka warung makan, kios-kios, dan pembuat terasi udang. Dengan demikian ini menciptakan peluang kerja baru, bagi masyarakat pribumi.
- b. Terjadi konflik antarwarga, meskipun pengembangan wisata dapat

meningkatkan pendapatan, hal ini juga dapat menimbulkan konflik. Sebagai contoh, terjadi adu mulut dan perebutan tempat pendirian warung-warung di sekitar pinggiran Pantai Bulak Baru. Hal ini disebabkan karena petinggi desa membebaskan masyarakatnya untuk berjualan dan mendirikan kios maupun warung bagi para pengunjung.

#### **2. Keberlanjutan Ekologis**

- a. Pengelolaan sampah, dengan meningkatnya jumlah pengunjung, masalah sampah menjadi lebih menjadi perhatian. Petinggi dan masyarakat pribumi telah melakukan kerja sama untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk penyediaan tempat sampah dan program daur ulang.
- b. Mitigasi abrasi, proyek pembangunan penahan gelombang yang dilakukan pada tahun 2015 bertujuan untuk mengurangi dampak abrasi. Namun, keberhasilan proyek ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa lingkungan Pantai Bulak Baru tetap terjaga dan tidak terjadi kerusakan lebih parah.

#### **3. Ekonomi Lokal**

- a. Usaha kuliner, masyarakat lokal diberikan kewenangan oleh petinggi desa untuk membuka warung makan atau kios makanan khas guna menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan. Ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan kuliner tradisional khususnya.
- b. Fasilitas wisata, dengan adanya pengembangan fasilitas seperti tempat parkir, toilet umum, dan area bermain, pengunjung akan merasa lebih nyaman, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah pengunjung serta pendapatan masyarakat pribumi.

## CONCLUSION

Pantai Bulak Baru posisinya di Desa Bulak Baru Kedung, Kabupaten Jepara memiliki potensi pariwisata yang menarik, terutama dengan keunikan kuliner tradisionalnya. Letaknya sekitar 11 km dari Bundaran Ngabul Jepara, akses transportasi mudah dijangkau, peningkatan jumlah pengunjung dari 50 orang pada 2020 menjadi lebih dari 80 orang pada awal 2024, pantai ini menunjukkan potensi yang menarik bagi pengembangan pariwisata lokal.

Pengelolaan pariwisata di Desa Bulak Baru, Kedung Jepara dimulai dengan inisiatif Bapak Somad pada 2013 dan diperkuat oleh kepemimpinan Bapak Purwoko sejak 2014. Melalui kolaborasi dengan Koramil Kedung 2 dan partisipasi aktif masyarakat, pantai ini mengalami transformasi signifikan dari lahan terlantar menjadi destinasi wisata yang menarik. Pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti penahan gelombang dan fasilitas publik, didukung oleh dana dari proposal kepada pemerintah provinsi. Partisipasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara semakin memperkuat pengelolaan pantai ini. Dengan peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun, terutama pada akhir pekan, Pantai Bulak Baru menunjukkan potensi yang cerah dalam mengembangkan pariwisata lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Pantai Bulak Baru Kedung Jepara, berdasarkan konsep tangga Arnstein, mengalami perubahan dari tahap partisipasi aktif pada awal pengembangan menjadi konsultasi yang terbatas pada tahap pengelolaan oleh Dinas Pariwisata. Awalnya, masyarakat pribumi memiliki peran signifikan

dalam merencanakan dan mengarahkan pengembangan, tetapi kontrol penuh kemudian beralih ke tangan pemerintah, membatasi kebebasan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, tingkat partisipasi masyarakat pribumi mengalami kemunduran dari partisipasi yang nyata menuju konsultasi yang terbatas, mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan pariwisata lokal.

Pengembangan Wisata Pantai Bulak Baru Kedung Jepara memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek. Secara sosial-budaya, terjadi perubahan pola kerja masyarakat beralih dari pertanian dan perikanan ke sektor pariwisata, meskipun hal ini juga menimbulkan konflik antarwarga terkait pendirian warung. Dalam aspek keberlanjutan ekologis, pengelolaan sampah serta mitigasi abrasi menjadi fokus utama untuk menjaga lingkungan. Dari segi ekonomi lokal, usaha kuliner dan pengembangan fasilitas wisata meningkatkan pendapatan masyarakat serta menarik lebih banyak pengunjung. Secara keseluruhan, pengembangan ini membawa peluang dan tantangan yang perlu dikelola dengan baik untuk keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut.

Direkomendasikan terutama bagi pemerintah desa Bulak Baru untuk mengadakan pelatihan pariwisata berupa pembuatan buah tangan (kerajinan kerang) guna meningkatkan keterampilan dan pendapatan masyarakat desa Bulak Baru. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan dapat segera membentuk kelompok sadar wisata Pantai Bulak Baru yang lebih terstruktur, sehingga ketika terjadi bencana pantai, mereka dapat segera sigap menanganinya. Kemudian, bagi kaum milenial, dapat mempromosikan wisata Pantai Bulak Baru dengan membuat video kreatif agar Pantai Bulak Baru Kedung Jepara lebih dikenal secara luas.

## BIBLIOGRAPHY

- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 135–146.
- Alfaris, M. R., Rahmalina, I., & Falaq, Y. (2023). TRADISI BARATAN JEPARA:

- WARISAN BUDAYA KRIYAN. *ARIMA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 47–53.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Asrini, N. K. P., & Adnyani, N. K. S. (2023).

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Dinamika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(3), 83–102.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47–58.
- Chaniago, D. S., Nugroho, H., & Isbah, M. F. (2024). Masyarakat Lokal dalam Konfigurasi Kapitalisme Negara di Sektor Pariwisata Studi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 10(1), 1–17.
- Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 23–32.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2023). Learning From Goa Pindul: Community Empowerment through Sustainable Tourism Villages in Indonesia. *The Qualitative Report*, 28(5), 1365–1383.
- Huberman, A. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Thousand Oaks, California SAGE Publications, Inc.
- Husin, S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Berau. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3(11), 31–40.
- Interview with Mr. Luqman as the guard of Bulak Baru Beach, April 19, 2024 at Bulak Baru Beach Kedung Jepara.
- Interview with Mr. Purwoko as the village official of Bulak Baru, April 19, 2024 at Bulak Baru Beach, Kedung Jepara.
- Krisnasari, R. (2022). Community Based Tourism Desa Pangandaran dan Desa Pananjung dalam Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Pantai Pangandaran Jawa Barat. *Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan*, 3(1), 62–68.
- Kulandima, R. U. L., & Lasso, A. H. (2023). Partisipasi Masyarakat Desa Tuafanu dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 119–131.
- Kurniawan, A. (2023). Konsep Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi Bangunan Kolonial di Jalur Belanda Singaraja. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 6(1), 263–274.
- Lasso, A. H., & Dahles, H. (2023). A Community Perspective on Local Ecotourism Development: Lessons from Komodo National Park. *Tourism Geographies*, 25(2–3), 634–654.
- Loupary, A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Buru dalam Pembangunan Desa Tertinggal menuju Desa Berkembang Ditinjau dari Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 1998. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9267–9273.
- Ma'ula, D. A., Kartiko, A., & Fatikh, M. A. (2024). Strategi Komunikasi Massa untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Desa Melalui Sektor Pariwisata. *Interdisciplinary Journal of Social Sciences*, 1(1), 25–38.
- Margaretha, R. (2024). Strategi Capacity Building dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 248–256.
- Márquez, L., Henríquez, V., Chevreux, H., Scheihing, E., & Guerra, J. (2024). Adoption of Learning Analytics in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review. *British Journal of Educational Technology*, 55(2), 439–459.
- Mularsari, A., Nugraha, R. N., & Pratiwi, R. (2024). Analysis of Community-Based Tourism Potential and Management Strategies for the Destination of Community Care Tourism in Kedung Sahong Ciliwung. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(03), 507–517.
- Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2022). Tantangan dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat di Era New Normal. *Masyarakat Indonesia*, 47(1), 91–104.
- Nofiyanti, F., Febiola, A., Baihaqi, A. M., & Patimahu, M. G. (2024). Penerapan Community Based Tourism dan Daya Tarik Wisata terhadap Sadar Wisata di Pantai Karang Beureum Banten. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan*

- Humaniora*, 8(3), 61–66.
- Nurwanto. (2020). Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata Menggunakan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kawasan Wisata Tebing Breksi. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*, 14(2), 109–124.
- Park, J., Zou, S., & Soulard, J. (2024). Transforming Rural Communities Through Tourism Development: An Examination of Empowerment and Disempowerment Processes. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(4), 835–855.
- Prasetyo, B. D., Febriani, N. S., & Dewi, W. W. A. (2024). Community Based Tourism (CBT) sebagai Model Pengembangan Desa Wisata Adat Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 92–106.
- Putri, D. P., & Suminar, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 93–103.
- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of Community Participation in Tourism Planning in Developing Countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2164240.
- Saputra, I. G. G., & Pitanatri, P. D. S. (2023). Digital Acceptance and Resilience in Rural Tourism Destination: a Case of Bali. In *Tourism and hospitality in Asia: Crisis, resilience and recovery* (pp. 275–296). Springer.
- Sheppard-Hawkins, J. (2024). *Citizen Participation, Relocation and Malmberget: A Study of Citizen Participation in Detailed Comprehensive Planning*.
- Sidiq, R. S. S., Indrawati, I., Marnelly, T. R., Ihsan, M., Rosaliza, M., & Sugiyanto, S. (2023). Penguatan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata berbasis Community Based Tourism dalam Pengembangan Pantai Sepahat. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(4), 857–869.
- Suryana, A., Darna, N., Noorikhshan, F. F., & Maulana, R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Perajin Pandai Besi Kampung Dokdak dalam Pengembangan Desa Karya Berbasis Kearifan Lokal untuk Mengurangi Pengangguran di Desa. *Abdimas Galuh*, 6(1), 70–81.
- Talitha, D. N., Putri, D. A., Nurulita, S., Putri, Y., & Aji, M. P. (2024). Analisis Efektivitas Program Pendampingan Desa: Upaya Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 11–23.
- Wahyuningtyas, R., Disastra, G., & Rismayani, R. (2023). Toward Cooperative Competitiveness for Community Development in Economic Society 5.0. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 17(3), 594–620.



kreatif · inovatif · tangguh · adaptif



TeamWork



Sinergi



Prestasi

**Diterbitkan Oleh:**

Program studi Perhotelan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember  
Anggota Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI)

**Alamat Redaksi**

Ruang redaksi Sadar Wisata Program studi DIII Perhotelan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember  
Jl. Karimata No.49 Telp. (0331) 322557 Fax. (0331) 337957 / 322557

**Surel:** [jurnalsadarwisata@unmuhjember.ac.id](mailto:jurnalsadarwisata@unmuhjember.ac.id)

**Laman:** <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/wisata>